PEMERINTAH PROVINSI BALI

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

SEKRETARIAT DAERAH



Jl. Basuki Rahmat-Niti Mandala
Renon Denpasar

www.baliprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai landasan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Dokumen ini merupakan upaya untuk mengarahkan langkah-langkah strategis dalam memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan atau sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Rencana Strategis (Renstra) tidak terlepas dari kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam adanya perencanaan ini. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak, khususnya para pejabat dan staf biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Bali, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Bali, 22 September 2025
Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**
DAFTAR ISI ..... **II**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3
1.4 KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA DALAM PERENCANAAN DAERAH 4
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI **7**
2.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI 7
2.1.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi *7*
2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH 13
2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 14
2.3.1 Penerapan dan Pencapaian SPM *14*
2.3.2 Dukungan Layanan *18*
2.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 26
2.4.1 Permasalahan Pelayanan pada Sekretariat Daerah *26*
2.4.2 Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah *27*
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN **35**
3.1 TUJUAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029 35
3.2 SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029 36
3.3 STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029 40
3.4 ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH 40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **44**
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN 44
4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 51
4.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 53
BAB V PENUTUP **60**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 7 Februari 2025 masa jabatan 2025-2030 merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab untuk Bali yang sejahtera, aman dan damai, melalui Visi dan Misi *"**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU**"*, yang diselenggarakan secara terencana menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan tradisi, adat istiadat, seni dan budaya dan kearifan lokal.

Dalam Surat Edaran Nomor 1635 tahun 2025 tentang "Penyampaian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 Sebagai Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Semesta Berencana Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029" yang merupakan ketentuan dalam penyusunan RENSTRA dimana seluruh Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Renstra tersebut yang bertujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 89 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantiknya sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, dimana memuat visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Program Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2045 serta arah kebijakan RPJMD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2045. Dalam penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029

didasarkan pada Visi Misi RPJMD Provinsi Bali. Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2025-2029 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka menengah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informatika Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Emas Baru 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan rencana program, kegiatan dan anggaran serta Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan/atau Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

4. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan menjadi arah penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah.

1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024, yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029.

RENSTRA Sekretariat Daerah bersama Renstra Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh mengandung Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, sehingga RENSTRA ini berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainya, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Sekretariat Daerah, fungsi Renstra dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Mengemukakan secara ringkas keterkaitan peranan Renstra Sekretariat Daerah dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian Program Prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Perangkat Daerah. Uraian tentang Struktur Organisasi, jumlah personil dan Tata Laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur dan mekanisme).

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan Sasaran/Target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan Sekretariat Daerah dan/atau indikator lainnya SDG atau indikator yang telah diratifikasi oleh emerintah.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Memuat hal-hal berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2029.
b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV menguraikan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan serta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu (Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 dan memuat penentuan target pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) dan memuat target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali merupakan perangkat daerah yang menjadi penunjang tugas-tugas pemerintahan di tingkat provinsi, dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Fungsi utama Setda adalah mendukung Gubernur Bali dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Setda juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan pelayanan publik di lingkungan Provinsi Bali. Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Lembaga Lain, dan Staf Ahli Lingkungan Pemerintah Daerah.

Prioritas Pembangunan Sekretaris Daerah yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Adapun Visi Misi yang diampu oleh Sekretariat Daerah adalah Misi 1 dan Misi 22, yaitu Misi 1 : Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sekala berdasarkan nilai-nilai kearifan loka Sad Kerthi, yaitu Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi, dan Misi 22 : Memantapkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah.

2.1.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi

Adapun Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Bali langsung berada di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Bali. Sedangkan untuk Struktur Organisasi Sekretariat Daerah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur

Bali Nomor 9 Tahun 2025. Adapun ruang lingkup kerja Kinerja Sekretariat Daerah menangani urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Urusan Renstra Sekretariat Daerah

Urusan Perpustakaan

TUJUAN	**Meningkatnya Literasi Masyarakat**		
INDIKATOR	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KETERANGAN**
Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	
Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan dan Pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di Bidang Perpustakaan	

Urusan Kearsipan

TUJUAN	**Meningkatnya Tata Kelola Arsip**		
INDIKATOR	**Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah**		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KETERANGAN**
Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	
Akreditasi dan Sertifikasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan Kompetensinya	

Urusan Sekretariat Daerah

TUJUAN	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien		
INDIKATOR	**Indeks Reformasi Birokrasi**		
PROGRAM	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**KETERANGAN**
Penataan Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	
Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	
Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
Fasilitasi Koordinasi Hukum	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	
Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	
Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	
Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

SEKRETARIS DAERAH;

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
   a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
      1) Sub Bagian Pemerintahan; dan
      2) Sub Bagian Otonomi Daerah.
   b. Bagian Kerjasama, membawahi:
      1) Sub Bagian Kerjasama; dan
      2) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
   c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
      1) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual dan Kelembagaan Bina Spiritual;
      2) Sub Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar;

2. Biro Hukum, terdiri dari:
   a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi:
      1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
      2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
      3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
   b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi:
      1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
      2) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
      3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum.
   c. Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi:
      1) Sub Bagian Litigasi;
      2) Sub Bagian Non Litigasi; dan
      3) Sub Bagian HAM dan Penyuluhan Hukum.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

1. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, terdiri dari:
   a. Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan, membawahi:
      1) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
      2) Sub Bagian Pengelolaan Strategi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
      3) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa.
   b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik membawahi:
      1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
      2) Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa; dan
      3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian.
   c. Bagian Perekonomian, membawahi:
      1) Sub Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
      2) Sub Bagian BUMD dan BLUD; dan
      3) Sub Bagian Administrasi Pembangunan.

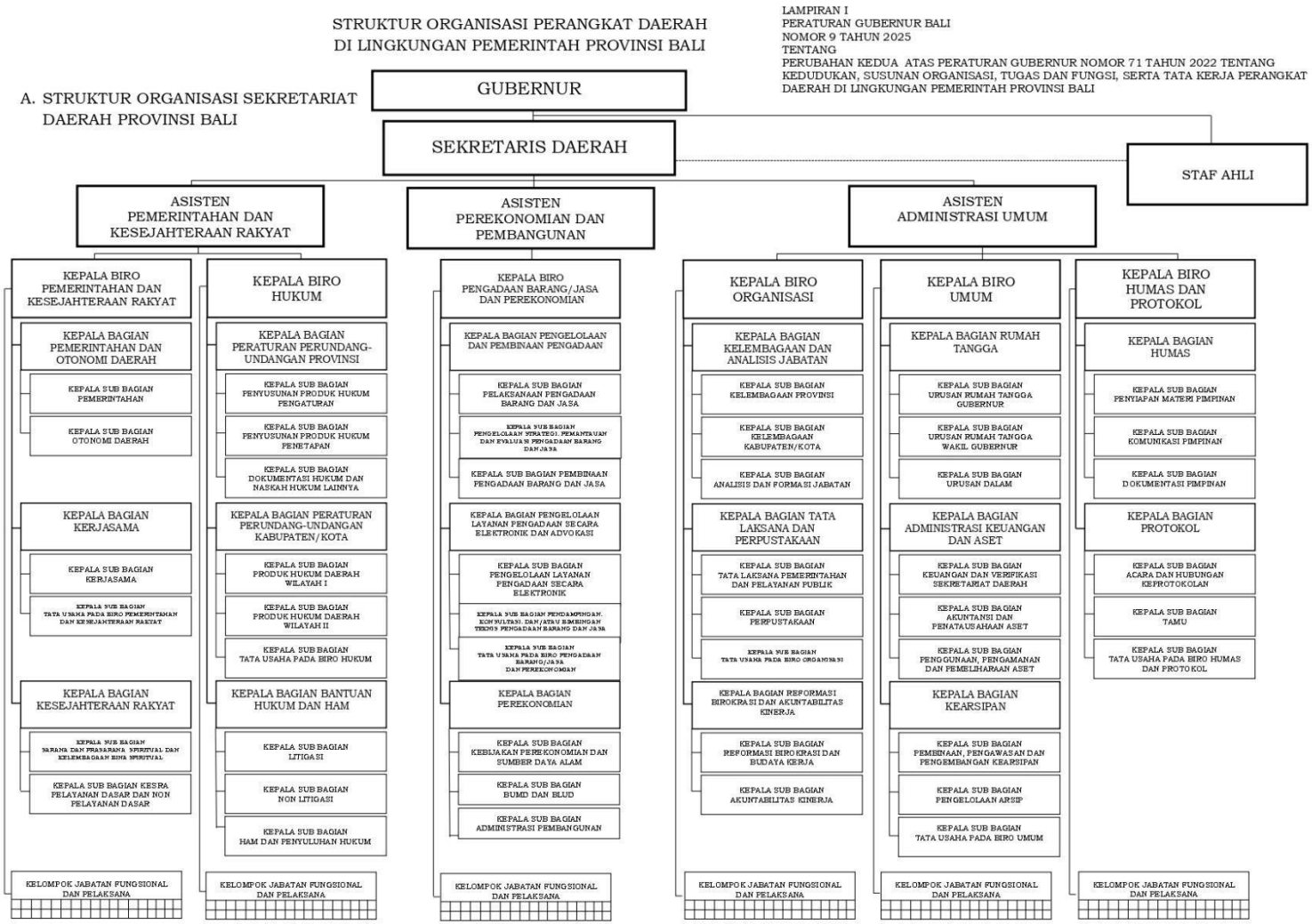
C. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1. Biro Organisasi, terdiri dari:
   a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi:
      1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
      2) Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/ Kota; dan
      3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.

b. Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan;
   1) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
   2) Sub Bagian Perpustakaan; dan
   3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi.
c. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi:
   1) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja; dan
   2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.

2. Biro Umum, terdiri dari:
   a. Bagian Rumah Tangga, membawahi:
      1) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
      2) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
      3) Sub Bagian Urusan Dalam.
   b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi:
      1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
      2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
      3) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset.
   c. Bagian Kearsipan, membawahi:
      1) Sub Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kearsipan;
      2) Sub Bagian Pengelolaan Arsip; dan
      3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum.
3. Biro Humas dan Protokol, terdiri dari:
   a. Bagian Humas, membawahi:
      1) Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan;
      2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
      3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
   b. Bagian Protokol, membawahi:
      1) Sub Bagian Acara dan Hubungan Keprotokolan;
      2) Sub Bagian Tamu; dan
      3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Humas dan Protokol.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali



2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sumber daya Sekretariat Daerah (Setda) mencakupi berbagai elemen penting yang mendukung fungsi dan operasionalnya, termasuk sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya teknologi.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset terpenting Setda, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, (Sekda), para Pejabat Eselon II, II dan IV, serta pegawai lainya yang bekerja di berbagai unit kerja Setda. SDM ini memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan administrasi, dan memberikan pelayanan administrasi kepada perangkat daerah yang berfungsi bertanggung jawab atas perencanaan, dan pengawasan tugas-tugas pemerintahan daerah, serta memberikan pelayanan administratif. Sumber Daya Keuangan setda memerlukan SDM yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Sumber daya keuangan ini berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta dapat juga berasal dari sumber-sumber lainya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berfungsi memastikan tersedianya anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan setda dan perangkat daerah. Sumber Daya Fisik Setda mencakupi kantor, peralatan kerja, sarana dan prasarana pendukung lainya. Sumber Daya Teknologi dalam era digital, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sangat penting, Setda perlu memiliki sumber daya TIK yang memadai untuk mendukung pengelolaan data, komunikasi dan pelayanan publik yang efisien.

Untuk Menunjang pelaksanaan tugas. Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki pegawai sebanyak 768 orang. Disamping potensi-potensi positif yang dimiliki SDM, juga didapatkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu ; a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b) pola pembinaan pegawai sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi; c) penerapan sistem manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pegawa. Adapun SDM/ Pegawai tersebut antara lain:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO	URAIAN	JABATAN	ESELON	PANGKAT/GOL	JUMLAH
1.	PNS	SEKRETARIS DAERAH	I	IV/e	1
		ASISTEN	II	IV/d	3
		STAF AHLI	II	IV/c	3
		KEPALA BIRO	II	IV/a-IV/d	5
		KEPALA BAGIAN	III	III/d-IV/b	17
		KEPALA SUB BAGIAN	IV	III/c-IV/a	47
		FUNGSIONAL	-	III/c-IV/a	73
		PELAKSANA	-	II/c - III/d	73
2.	PPPK	FUNGSIONAL	-	X-VII	35
		PELAKSANA	-	X-VII	276
3.	NON ASN	STAF	-	-	224

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam konteks Sekretariat Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merujuk pada ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. SPM mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerja umum, perumahan rakyat, dan perlindungan masyarakat. Pada biro-biro yang berada dalam lingkungan.

Peran Sekretariat Daerah dalam SPM:

1. Sekretariat Daerah berperan sebagai koordinator dan fasilitator;
2. Sekretariat Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan SPM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. Sekretariat Daerah juga berperan dalam menyusun laporan kinerja SPM secara berkala dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.

2.3.1 Penerapan dan Pencapaian SPM

1. Bidang Urusan Pendidikan

1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada

bagian kedua SPM Pendidikan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Pelayanan pendidikan menengah;
2. Pelayanan pendidikan khusus.

1.2. Target Pencapaian SPM

Tabel 2.2
Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	100 %	2024
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	100 %	2024

2. Bidang Urusan Kesehatan

2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada bagian ketiga SPM Kesehatan Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar untuk Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

2.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada pasal 4 yaitu capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100%.

Tabel 2.3
Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Layanan	Target	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %	2024
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100 %	2024

3. Bidang Urusan Pekerja Umum

3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Bab II Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Bagian Kesatu SPM Bidang Pekerjaan Umum menyebutkan Pasal 5 ayat (1) Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

a. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota; dan
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota.

3.2 Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.4
Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Capaian	
					2022	2023
1	Pekerjaan Umum	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	100%	2024		
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	100%	2024		

Sumber: Dinas PUPR PERKIM Provinsi Bali (2024)

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

4.2 Target Pencapaian SPM

Penerapan SPM Perumahan Rakyat sesuai dengan kondisi pada tahun 2024 tidak ada Bencana tingkat Provinsi dan tidak ada relokasi program pemerintah sehingga untuk kegiatan ini tidak ada realisasi pelaksanaan. Akan tetapi sesuai dengan tahapan pelaksanaan penerapan SPM ini dilakukan kegiatan pendataan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam

perencanaan penerapan SPM. Kegiatan pendataan yang dilakukan tahun 2024 merupakan langkah awal penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat. Hingga tahun 2024 data yang diperoleh adalah data jumlah rumah dan lokasi lahan potensial yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Perumahan Rakyat. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Tabel Lokasi Rumah di Kawasan Rawan Bencana

No.	Kabupaten	Luas Perumahan (Ha)	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Klungkung	476,97	31.606	7.909	39.545
2	Karangasem	915,50	25.885	5.723	26.842
3	Buleleng	71.678,60	27.703	6.945	27.780
Total		**73.071,07**	**85.194**	**20.577**	**94.167**

Sumber : Dinas PUPR PERKIM Provinsi Bali, 2024

2.3.2 Dukungan Layanan

1. Dukungan Layanan Bidang Urusan Pendidikan

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali tahun 2024 total sebanyak 10.150 orang terdiri dari 8.488 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1.662 orang dengan status tenaga kontrak (Non ASN). Untuk tenaga ASN terdiri dari 4.824 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3.664 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Tenaga ASN terkonsentrasi di lingkungan Kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 191 orang dan tenaga kontrak sebanyak 237 orang. ASN yang terdistribusikan pada Satuan Pendidikan sebanyak 7.808 orang terdiri dari 4.144 orang PNS dan 4.072 orang PPPK dengan tugas sebagai Kepala Sekolah sebanyak 140 orang.

Secara administrasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memiliki tanggung jawab pengelolaan dan urusan pelayanan terhadap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan total layanan sebanyak 365 sekolah, yang terdiri atas 90 SMA Negeri, 71 SMA Swasta, 58 SMK Negeri dan 112 SMK Swasta, 12 SLB Negeri dan 3 SLB Swasta. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dibantu 2 Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPTD BPTEKDIK) dan UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPTD BPTKK).

2. Dukungan Layanan Bidang Urusan Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

   Pada tahun 2024 fasilitas kesehatan yang dimiliki di Provinsi Bali meliputi 82 Rumah Sakit, 120 puskesmas, 252 klinik, 9 public safety center di 9 kabupaten/kota dan Provinsi. Tetapi data ini belum cukup untuk mengetahui kapasitas kesehatan terutama dalam masa tanggap darurat bencana. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan mengamanatkan penanggulangan krisis kesehatan dilakukan berdasarkan sistem klaster yang melaksanakan fungsi koordinasi, kolaborasi dan integrasi penanggulangan krisis di tingkat daerah yang merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan bencana. Klaster kesehatan terdiri dari sub klaster (pelayanan kesehatan, kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, jiwa, gizi, dan DVI) dan tim pendukung (tim logistik, tim data dan informasi dan tim promosi kesehatan) yang kegiatannya dikoordinir Dinas Kesehatan Provinsi.

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

   Sasaran Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang di gunakan adalah penduduk yang masuk dalam kelompok risiko rawan terkena KLB PD3I yaitu kelompok umur 0-2 thn yang merupakan sasaran imunisasi dasar dan lanjutan. Pelayanan kesehatan pada kelompok ini bertujuan untuk mencegah terjadinya KLB kasus PD3I di Prov Bali. Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah memberikan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, dibentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Tim tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan KLB di Provinsi Bali diantaranya adalah Balai Besar Veteriner Denpasar, Fakultas Kedokteran UNUD, Dinas Peternakan Provinsi Bali, RSUP Sanglah Denpasar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, KKP Kelas I Denpasar, serta seluruh Seksi/Subbag di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			79	80.50	81.00	81.50	79.20	78.99	79.40	79.80	
2	Indeks Reformasi Birokrasi			71	74	75	76	91.41	93.46	92.80	93.40	
3	Persentase Capaian Realisasi SPM Provinsi Bali			N/A	70	75	80	94,44	93,97			

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Tahun 2020-2024

Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

NO	PROGRAM	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.747.921.668	1.739.721.312	6.590.374.953	6.242.620.069	7.635.001.546	7.514.146.579	1.935.221.838	1.738.749.004	2.168.646.130	1.903.460.886
2.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	508.638.500	335.175.900	1.148.963.485	1.041.933.806	2.184.010.227	1.651.142.870	1.747.510.156	1.359.361.418	1.684.516.980	1.518.334.473
3.	Program Kesejahteraan Rakyat	12.055.257.805	9.822.460.177	20.911.690.163	18.868.670.978	34.066.894.896	33.483.836.757	75.811.614.672	72..169.418.447	47.968.779.030	45.636.230.777

Biro Hukum

NO	PROGRAM	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)
1	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.423.058.674	4.132.736.415	4.353.769.888	4.255.452.256	4.642.753.476	4.427.903.056	5.232.126.870	4.619.705.752
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	7.809.060.91	6.039.448.859	1.519.534.764	1.437.508.703	1.228.154.276	1.121.658.165	2.374.918.240	1.864.692.342
3	Program Pengembangan Produk Hukum	1.716.268.698	1.711.767.630	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Pengembangan Produk Hukum	378.654.548	377.978.747	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Bantuan Hukum dan HAM	2.221.630.531	1.962.613.592	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	648.310.614	640.394.476	-	-	-	-	-	-	-	-

Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian

NO	PROGRAM	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	-	3.328.928.054	2.953.794.604	2.972.755.364	2.507.259.554	3.307.678.560	2.683.576.348
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	-	-	-	-	6.232.816.710	485.147.794	627.688.000	481.981.642	1.212.485.000	905.635.080
3	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	-	-	-	-	2.714.843.950	2.291.896.510	3.725.179.000	2.713.552.974	7.575.257.000	7.338.956.640
4	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	58.375.030	45.431.403	73.660.000	15.695.350	82.125.000	67.025.724

Biro Organisasi

NO	PROGRAM	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)
1	Program Pembinaan Perpustakaan	-	-	-	-	444.857.938	419.865.580	587.451.764	448.397.304	525.774.880	486.215.430
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	-	-	-	-	-	-	-	-	101.698.480	99.978.980
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	6.826.510.784	5.707.108.732	657.515.344	536.168.186	1.313.220.988	819.570.873	2.048.907.450	1.543.502.036
4	Program Penataan Organisasi	-	-	252.625.351	229.178.302	326.865.406	303.912.237	892.836.892	608.963.417	962.815.700	810.539.019

Biro Umum dan Protokol

NO	PROGRAM	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	50.219.074.830	43.759.954.780	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	2.144.247.652	2.024.652.845	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.317.159.086	1.307.270.124	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	83.482.129.916	73.462.912.062	116.168.334.356	99.864.602.620	523.603.864	435.430.514	661.907.040	610.378.540
5	Program Pengelolaan Arsip	-	-	-	-	164.453.346	134.700.526	98.528.923.086	83.115.508.761	88.108.216.382	76.016.161.054

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

2.4.1 Permasalahan Pelayanan pada Sekretariat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) meliputi ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan kebijakan, lemahnya koordinasi antara perangkat daera, serta kurangnya kapasitas SDM untuk menjalankan tugas dan fungsi Setda secara optimal;

1. Ketidaksesuaian Rencana dan Pelaksanaan Kebijakan
   a. Perencanaan yang kurang sesuai, Renstra Strategis yang belum selaras atau belum mampu mengidentifikasi isu-isu strategis,
   b. Pelaksanaan yang kurang efektif: implementasi kebijakan terhadap perubahan lingkungan strategis yang menimbulkan tumpang tindih atau kurang efektif,
   c. Adaptasi terhadap perubahan: kurangnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target pembangunan daerah,
2. Koordinasi Antara Perangkat Daerah yang Lemah
   a. Kurangnya sinkronisasi: koordinasi antara dinas dan lembaga teknis daerah yang belum optimal, sehingga menyebabkan tumpang tindih tugas atau kurang nya sinergisitas
   b. Kurangnya komunikasi: komunikasi yang kurang lancar antara SETDA dengan perangkat daerah dapat menyebabkan miskomunikasi atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas,
   c. Kurangnya data dan informasi: kurangnya pertukaran data dan informasi antara perangkat daerah dapat menghambat pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif
3. Kapasitas SDM yang Belum Memadai
   a. Kurangnya keterampilan: SDM yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas SETDA khususnya dalam bidang perencanaan, pengawasan, dan pelayanan publik
   b. Kurang sarana dan prasarana: kurangnya dukungan sarana dan prasarana seperti teknologi informasi dan komunikasi, dapat menghambat kinerja SDM
   c. Kurangnya motivasi dan inovasi: kurangnya motivasi dan inovasi dari SDM dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah.

4. Permasalahan Lainya
   a. Tantangan Eksternal: Perubahan kebijakan yang sering terjadi dan tumpang tindih dapat menghambat pelaksanaan tugas SETDA
   b. Lingkungan yang tidak konduktif: kondisi keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum yang tidak terjamin dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah

Langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan
2. Meningkatkan Koordinasi
3. Meningkatkan Kapasitas SDM
4. Meningkatkan Inovasi dan Adaptasi

2.4.2 Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah

Pada tahun 2025 program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Bali memasuki awal baru dari RPJMD 2025-2029 dan merupakan kebijakan baru dari periode terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2030. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas, fungsi dan tataran kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, beberapa permasalahan/isu-isu/kendala yang harus mendapat penanganan, sebagai berikut:

I. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan, meliputi sebagai berikut:
   1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali, meliputi:
      a. Belum optimalnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali;
      b. Masih adanya potensi sengketa batas wilayah;
      c. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan potensi daerah.
   2. Belum optimalnya pelaksanaan Sradha dan Bhakti di kalangan Krama Bali
II. Biro Hukum, meliputi sebagai berikut:
   1. Kualitas perancangan dan pelayanan produk hukum daerah belum optimal;
   2. Pelayanan aksesibilitas informasi hukum dan produk hukum daerah belum optimal;
   3. Pelayanan dan penanganan kasus-kasus hukum dan pelaporan Ham belum optimal; dan

4. Perda dan perkada yang terdampak undang-undang cipta kerja.

III. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Ekonomi, meliputi sebagai berikut:
   1. Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya dan layanan);
   2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan;
   3. Pengadaan barang/jasa pemerintahan berpotensi menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%-40% dari total APBD);
   4. Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah;
   5. Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah; dan
   6. Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pelaporan pembangunan daerah.

IV. Biro Organisasi, meliputi sebagai berikut:
   1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal;
   2. Tata kelola pemerintahan belum optimal;
   3. Pelayanan publik belum optimal; dan
   4. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan serta rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.

V. Biro Umum, meliputi sebagai berikut;
   1. Belum Optimalnya Pelayanan Terhadap Atensi Pimpinan;
   2. Belum Optimalnya Kualitas SDM di Bidang Teknologi Informasi; dan
   3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemahaman Terhadap Arsip.

VI. Biro Humas dan Protokol, meliputi sebagai berikut;
   1. Tingginya Dinamika Kegatan Pimpinan yang butuh Atensi Cepat dan Tepat;
   2. Kurang Maksimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
   3. Belum Memadainya Tenaga Keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan Asing.

Tabel 2.8
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
				INTERNAL	EKSTERNAL	
Gambaran Pelayanan Setda						
1	Kebijakan	Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan	Belum ada	SDM	Sumber permasalahan kebijakan	Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan
2	Produk Hukum yang mencakup kuantitas, kualitas, kejelasan objek hukum	Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu	Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM	Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD	Keterbatasan SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan
3	Kelembagaan	- Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan ukuran - Kematangan Lembaga UKPBJ Level 3 (Proaktif	- Permendagri 99/2018 - Permenpan RB 20/2018 - Perlem LKPP No 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggaran Peralatan SDM Sistem pengolahan data dukung belum terintegrasi secara menyeluruh	Perundang-Undangan Kebijakan Surat Edaran Koordinasi dengan para stakeholder belum maksimal	- Data dari Perangkat Daerah yang tidak lengkap - Kurang respon dari Perangkat Daerah - Kompensasi SDM masih belum memadai

NO	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
				INTERNAL	EKSTERNAL	
4	Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah	Belum mencapai target yang ditetapkan	Belum ada	Kurangnya SDM yang Kompeten dalam penyusunan proposal penawaran	Perangkat Daerah Teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi dan dokumentasi
5	Kualitas Layanan Keprotokolan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan	Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan turunan/teknis tentang keprotokolan, belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan
6	Pengendalian kegiatan	- Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan - Sudah disusun Risk Register, Dokumen Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa dan Laporan SPPIP	- Realisasi kegiatan Provinsi - SOP Pengelolaan Risiko	- Kuantitas SDM - Kompetensi SDM kurang memadai	- PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan - Pendidikan dan pelatihan belum memadai	- Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan - Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kurang maksimal dalam mengelola risiko

NO	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
				INTERNAL	EKSTERNAL	
7	Kewajiban Penyusunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	- Laporan tersusun tepat waktu - Sudah tersusun dengan baik	- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Dokumen kinerja	- Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan - Kompetensi SDM kurang memadai	- Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk menyuplai data yang diperlukan dalam penyusunan laporan - Pendidikan dan pelatihan belum memadai	- Validasi dan Kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah - Pelaksanaan pelaporan kurang maksimal dalam mengelola laporan
8	Kewajiban Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	Sudah disusun dengan baik	Hasil Evaluasi SAKIP	-	SDM kurang	Adanya mutasi ASN
9	Batas Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali	Patok dan Papan Batas masih kurang terpelihara dengan baik	Permendagri No. 4 Tahun 2012	Kegiatan Sosialisasi Patok dan papan batas wilayah	Patok batas wilayah dipasang oleh Pemerintah Provinsi Bali	Koordinasi yang belum optimal
10	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali belum dapat	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU No. 23 Tahun 2014	Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan urusan

NO	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
				INTERNAL	EKSTERNAL	
	Pemerintah Provinsi Bali	dilaksanakan sesuai peraturan perundangan				yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi terkait pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014
11	Regulasi tentang kehidupan beragama	Fasilitasi kehidupan beragama	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006	Ketidakjelasan tugas dan fungsi	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tindak Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Bali dapat disimpulkan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia dijalankan melalui dua pendekatan utama yang saling melengkapi: RB General dan RB Tematik. RB General, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, merupakan upaya untuk menata ulang sistem penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Fokusnya adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi secara holistik. RB General mencakup delapan area perubahan utama: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen. SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas Pelayanan publik.

Tabel 2.9
Hasil Evaluasi RB/ Indeks RB

RB General Awal	80.31
Koefisien	0.8
RB General	81.11
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	81.11
RB Tematik	12.35
Indeks RB	93.46

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Indeks RB Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 93,46. Pencapaian ini merupakan hasil dari penilaian RB General dan RB Tematik. Nilai RB General Provinsi Bali adalah 81,11, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 75,94. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, meliputi area-area seperti manajemen perubahan, penataan regulasi, penguatan organisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, RB Tematik Provinsi Bali memperoleh nilai 12,35. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, RB Tematik tetap berperan penting dalam mencapai target Indeks RB yang telah ditetapkan. RB Tematik berfokus pada isu-isu prioritas yang membutuhkan penanganan khusus dan terukur, seperti reformasi

birokrasi di bidang pengadaan barang dan jasa, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Evaluasi RB ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan Renstra juga untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra juga sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, serta memastikan keselarasan antara tujuan Sekretaris Daerah dengan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara garis besar Tujuan Renstra Sekretariat Daerah, meliputi antara lain:

1. Meningkatkan Akuntabilitas:
   Renstra membantu dalam mengukur kinerja Sekretariat Daerah dan memastikan bahwa kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana.
2. Pedoman Bagi Seluruh Bagian Sekretariat Daerah:
   Renstra menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan renstra.
3. Mendukung Tata Pemerintahan Yang Baik:
   Renstra berkontribusi pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan efisien.
4. Sebagai Acuan Dalam Penyusunana Renja:
   Renstra memastikan bahwa Renja yang disusun selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis Sekretariat Daerah.

5. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya:
   Renstra membantu dalam mengalokasikan sumber daya, termasuk anggaran daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
6. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah:
   Renstra dapat menjadi alat untuk meningkatkan kinerja berbagai perangkat daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah adalah meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Setda. Renstra Sekretariat Daerah digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Pembangunan.

Adapun sasaran renstra sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan:
   Renstra Setda memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD
2. Tugas pokok dan Fungsi:
   Renstra Setda mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setda.
3. Pedoman Perencanaan:
   Renstra Setda menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta sebagai acuan dalam pengelolaan anggaran.
4. Evaluasi Kinerja:
   Renstra Setda juga berfungsi sebagai alat evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat daerah Tahun 2025-2029

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rayat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	83	84	85	86	87	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	75%	90%	91%	92%	93%	94%	
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Difasilitasi	N/A	80%	83%	85%	87%	90%	

Biro Hukum

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Indeks Reformasi Hukum	98,31	98,32	98,33	98,34	98,35	98,36	

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Persentase Rata-Rata Pemanfaatan Sistem PBJ	95%	95%	95%	97%	97%	97%	
		Persentase Keterisian Jabatan Fungsional PBJ terhadap Formasi yang sudah Mendapatkan Rekomendasi	75%	80%	80%	85%	85%	90%	
		Tingkat Kematangan Lembaga UKPBJ	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	95%	95%	95%	97%	97%	97%	
		Persentase Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Perekonomian Bali yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Meningkatkan Tertib Administrasi Pembangunan	Persentase Terkendalinya Inflasi Provinsi Bali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kinerja BUMD Kategori Sehat	70%	70%	75%	80%	80%	85%	
		Persentase Capaian Program Kerja TPKAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Biro Organisasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (RPD)	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat	87%	91%	93%	95%	97%	99%	
			60%	70%	72%	74%	76%	78%	

Biro Umum

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik	83	83	83	83	83	83	

Biro Humas dan Protokol

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	82	83	84	84	84	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Informasi Publik dan Layanan Keprotokolan	Persentase Informasi Publik yang tersampaikan dengan baik ke Masyarakat	93	94	95	96	97	98	
		Persentase Kepuasan Pimpinan Terhadap Pelayanan Keprotokolan	90	91	92	93	94	95	

3.3 Strategis Sekretariat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah meliputi menyusun kebijakan daerah, koordinasi tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan, serta pelayanan administrasi dan pembinaan ASN.

Sekretariat Daerah menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra, di antaranya:

1. Menyusun kebijakan Daerah:
   Setda membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan daerah yang sesuai dengan RPJMD
2. Koordinasi Tugas Perangkat Daerah:
   Setda memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah untuk mengidentifikasi kendala dan mengambil langkah korektif.
3. Pelayanan Administrasi dan Pembinaan ASN:
   Setda memberikan pelayanan administrasi yang baik dan melakukan pembinaan ASN agar profesional dan kompeten.
4. Pengembangan SDM ASN:
   Setda melakukan berbagai upaya pengembangan SDM ASN, seperti pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir.
5. Inovasi dan peningkatan Kualitas Pelayanan:
   Setda mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien.

3.4 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan dalam Renstra juga merupakan pedoman yang mengarahkan rumusan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berperan sebagai panduan dalam menentukan strategis-strategis dalam program kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Adapun Arah Kebijakan tersebut, meliputi;

1. Mencerminkan Visi,Misi, dan Tujuan Jangka Panjang;
2. Menentukan Prioritas Pembangunan;
3. Menentukan Kebijakan Umum;
4. Menghubungkan dengan Rencana Keuangan dan Sumber Daya;
5. Memperjelas Rumusan Strategis
6. Memandu Pemilihan Program dan Kegiatan

Tabel 3.2
Pentahapan Pelaksanaan per tahun sebagai implementasi langkah-langkah untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan

BIDANG PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN				
					TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Serta Kearifan Lokal (Prioritas 1)	Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali	Meningkatnya kualitas Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai *Sad Kerthi*	Memperkuat Pemahaman Krama Bali Terhadap Nilai-Nilai *Sad Kerthi*	Meningkatkan sosialisasi *Sad Kerthi* pada kehidupan Krama Bali melalui Desa Adat	Pembinaan mental spiritual generasi muda dan tokoh agama	Pembinaan mental spiritual bagi ASN dan tokoh adat	Pembinaan mental spiritual bagi masyarakat dan ormas	Pembinaan mental spiritual generasi muda dan tokoh agama	Pembinaan mental spiritual bagi ASN dan tokoh adat
			Meningkatkan keharmonisan umat beragama berdasarkan pemahaman Krama Bali terhadap Nilai-Nilai *Sad Kerthi*	Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi.*	Pemberian bhakti penganyar, pelaksanaan yasa kerthi, pemberian hibah masyarakat dan kelembagaan	Pemberian bhakti penganyar, pelaksanaan yasa kerthi, pemberian hibah masyarakat dan kelembagaan	Pemberian bhakti penganyar, pelaksanaan yasa kerthi, pemberian hibah masyarakat dan kelembagaan	Pemberian bhakti penganyar, pelaksanaan yasa kerthi, pemberian hibah masyarakat dan kelembagaan	Pemberian bhakti penganyar, pelaksanaan yasa kerthi, pemberian hibah masyarakat dan kelembagaan

BIDANG PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN				
					TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		Terwujudnya Kasukertan Desa Adat	Meningkatkan peran Desa Adat dalam pengelolaan sosial, budaya, dan ekonomi berbasis nilai-nilai *Sad Kerthi*.	Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Desa Adat					
Bali Pulau Digital dan keamanan Digital (Prioritas 6)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pengumpulan dan Pengolahan Data yang Akurat	Fokus pada Hasil Kinerja (berorientasi hasil)	Reviu dan Evaluasi	Transparansi dan Akuntabilitas	Transparansi dan Akuntabilitas

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, berdasarkan Permendagri tersebut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan sebagaimana dituangkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					**37.664.577.105**		**42.453.095.849**		**44.599.457.002**		**49.593.383.267**		**51.930.373.195**	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**2.865.770.839**		**3.965.770.839**		**4.115.070.839**		**6.965.770.839**		**7.115.770.839**	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82	82	83	2.865.770.839	84	3.965.770.839	85	4.115.070.839	86	6.965.770.839	87	7.115.770.839	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					**1.959.614.502**		**2.282.115.090**		**2.498.915.747**		**2.742.868.491**		**2.935.621.222**	
Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	70	75	77	1.959.614.502	79	2.282.115.090	81	2.498.915.747	83	2.742.868.491	85	2.935.621.222	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					**32.839.191.764**		**36.205.209.920**		**37.985.470.416**		**39.884.743.937**		**41.878.981.134**	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Ditindaklanjuti (%)	73	-	80	32.839.191.764	83	36.205.209.920	85	37.985.470.416	87	39.884.743.937	90	41.878.981.134	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					**37.664.577.105**		**42.453.095.849**		**44.599.457.002**		**49.593.383.267**		**51.930.373.195**	

Biro Hukum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					**6.544.055.989**		**8.235.367.232**		**8.753.382.613**		**12.050.674.819**		**12.554.090.785**	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**2.951.063.828**		**4.051.063.828**		**4.171.570.893**		**7.021.570.893**		**7.171.570.893**	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	81	81	81,5	2.951.063.828	82	4.051.063.828	82,5	4.171.570.893	82,5	7.021.570.893	83	7.171.570.893	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					**3.592.992.161**		**4.184.303.404**		**4.581.811.720**		**5.029.103.926**		**5.382.519.892**	
Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum (%)	100	100	100	3.592.992.161	100	4.184.303.404	100	4.581.811.720	100	5.029.103.926	100	5.382.519.892	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					**6.544.055.989**		**8.235.367.232**		**8.753.382.613**		**12.050.674.819**		**12.554.090.785**	

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

BIDANG URUSAN / PROGRAM OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					**4.396.920.980**		**5.803.161.528**		**6.159.031.390**		**8.959.443.886**		**9.292.478.297**	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**2.536.107.573**		**3.636.107.573**		**3.786.107.573**		**6.354.867.100**		**6.504.867.100**	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82	83	83	2.536.107.573	84	3.636.107.573	84	3.786.107.573	84	6.354.867.100	84	6.504.867.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					**892.420.001**		**1.039.288.671**		**1.138.020.968**		**1.249.118.486**		**1.336.899.217**	
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	892.420.001	100	1.039.288.671	100	1.138.020.968	100	1.249.118.486	100	1.336.899.217	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					**853.541.591**		**994.011.906**		**1.088.442.916**		**1.194.700.445**		**1.278.657.005**	
Meningkatnya Kualitas Pengadaaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (%)	85	85	85	853.541.591	85	994.011.906	90	1.088.442.916	90	1.194.700.445	90	1.278.657.005	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					**114.851.815**		**133.753.378**		**146.459.933**		**160.757.855**		**172.054.975**	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)	87	87	87	114.851.815	87	133.753.378	90	146.459.933	90	160.757.855	90	172.054.975	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					**4.396.920.980**		**5.803.161.528**		**6.159.031.390**		**8.959.443.886**		**9.292.478.297**	

Biro Organisasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					**1.255.000.000**		**1.380.500.000**		**1.518.550.000**		**1.670.405.000**		**1.837.445.500**	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					**1.030.000.000**		**1.133.000.000**		**1.246.300.000**		**1.370.930.000**		**1.508.023.000**	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Provinsi Bali	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik (%)	60	70	70	1.030.000.000	72	1.133.000.000	74	1.246.300.000	76	1.370.930.000	78	1.508.023.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					**225.000.000**		**247.500.000**		**272.250.000**		**299.475.000**		**329.422.500**	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Provinsi Bali	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun (%)	5	5	5	225.000.000	7	247.500.000	9	272.250.000	11	299.475.000	13	329.422.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					**3.371.079.315**		**4.597.872.414**		**4.833.108.930**		**7.779.020.456**		**8.004.802.382**	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**2.600.644.785**		**3.700.644.785**		**3.850.644.785**		**6.700.644.785**		**6.850.644.785**	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	85	86	87	2.600.644.785	88	3.700.644.785	88	3.850.644.785	88	6.700.644.785	88	6.850.644.785	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					**770.434.530**		**897.227.629**		**982.464.145**		**1.078.375.671**		**1.154.157.597**	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik (%)	87	89	91	770.434.530	93	897.227.629	95	982.464.145	97	1.078.375.671	99	1.154.157.597	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
TOTAL KESELURUHAN					**4.626.079.315**		**5.978.372.414**		**6.351.658.930**		**9.449.425.456**		**9.842.247.882**	

Biro Umum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					**449.040.991**		**489.663.489**		**502.060.379**		**500.975.672**		**487.437.552**	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					**449.040.991**		**489.663.489**		**502.060.379**		**500.975.672**		**487.437.552**	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Kearsipan (Nilai)	63	64	65	449.040.991	65	489.663.489	65,5	502.060.379	66	500.975.672	66,5	487.437.552	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip (%)	100	100	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					**69.800.564.515**		**71.560.135.789**		**71.710.135.789**		**74.710.135.789**		**74.312.690.615**	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**69.800.564.515**		**71.560.135.789**		**71.710.135.789**		**74.710.135.789**		**74.312.690.615**	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	83	83	83	69.800.564.515	83	71.560.135.789	83	71.710.135.789	83	74.710.135.789	83	74.312.690.615	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
TOTAL KESELURUHAN					**70.249.605.506**		**72.049.799.278**		**72.212.196.168**		**75.211.111.461**		**74.800.128.167**	

Biro Humas dan Protokol

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					**27.732.433.474**		**29.119.055.148**		**30.575.007.905**		**32.103.758.300**		**33.708.946.215**	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**27.732.433.474**		**29.119.055.148**		**30.575.007.905**		**32.103.758.300**		**33.708.946.215**	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	0	0	82	6.808.574.510	83	7.149.003.236	84	7.506.453.397	85	7.881.776.067	86	8.275.864.870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kepuasan layanan informasi publik dan layanan keprotokolan	Persentase Informasi Publik yang tersampaikan dengan baik ke Masyarakat (%)	0	0	94	20.923.858.964	95	21.970.051.912	96	23.068.554.508	97	24.221.982.233	98	25.433.081.345	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Keprotokolan (%)	0	0	91		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					**27.732.433.474**		**29119055148.00**		**30.575.007.905**		**32.103.758.300**		**33.708.946.215**	

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja Setda dalam mencapai tujuan strategisnya. Iku ini membantu Sekda dalam menyusun perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Iku juga berperan dalam pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga IKU adalh merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tujuan penetapan IKU adalah sebagai berikut;

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasarn strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama, antara lain:

1. Klarifikasi apa apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai;
2. Menyusun draf awal indikator kinerja utama yang mungkin dapat digunakan;
3. Melakukan penilaian setiap indikator kinerja utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja;
4. Memilih indikator kinerja utama.

Berikut Kinerja Indikator Utama pada Sekretariat Daerah, pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4.01.2.23.2.24.01.0000 - Sekretariat Daerah										
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	-	73,00	73,73	74,43	75,15	75,88	76,60	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	92,80	93,40	93,80	94,40	94,80	95,40	
3	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali	Angka	0	18,96	24,25	28,30	33,13	37,23	43,11	
4	Nilai AKIP	Nilai	-	79,40	79,80	80,20	80,60	81,00	81,40	
5	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	-	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,62	
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	98,31	98,32	98,33	98,34	98,35	98,36	

4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan dan pengukuran indikator kinerja kunci/utama (IKK/IKU). Perumusan indikator kinerja adalah yang menggambarkan keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah yang diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator kinerja lainnya yang digunakan yang diintegrasikan dalam rumusan yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja.

Tujuan IKK adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut Indikator Kunci Sekretariat Daerah pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										

Biro Hukum

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa		%	85	85	85	85	90	90	90	
3	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku		%	87	87	87	87	90	90	90	

Biro Organisasi

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
1	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	positif	%	5	5	5	7	9	11	13	
2	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	positif	%	60	70	70	72	74	76	78	
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	positif	%	87	89	91	93	95	97	99	

Biro Umum

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
1	Nilai Evaluasi Kearsipan	positif	Nilai	63	64	65	65	65,5	66	66,5	
2	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	positif	%	100	100	60	65	70	75	80	
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	positif	Nilai	83	83	83	83	83	83	83	

Biro Humas dan Protokol

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2025- 2029 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025-2029

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Bali. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Bali. Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memahami kemana arah kebijakan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

LAMPIRAN

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
4.01.2.23.2.24.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali			Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali (Angka)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yangÂ Ditindaklanjuti (%)	4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Pengembangan Mental Spiritual yang difasilitas	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	
					Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	
				Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	4.01.04.1.02.0003 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan otonomi daerah		Persentase Realisasi Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
				Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	4.01.03.1.01.0003 - Fasilitasi Penataan Wilayah	
				Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	4.01.03.1.02.0001 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	
					Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum (%)	4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
				Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	
					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	
				Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0002 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
4.01.2.23.2.24.01.0007 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan		Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti (%)	4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	
			Meningkatnya Kualitas Pengadaaan Barang dan Jasa		Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (%)	4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
				Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Pembangunan		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)	4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
				Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	4.01.08.1.02.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
4.01.2.23.2.24.01.0005 - Biro Organisasi							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Provinsi Bali		Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik (%)	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
				Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.1.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.1.01.0009 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	
					Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	2.23.02.1.01.0011 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2.23.02.1.01.0016 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
				Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	2.23.02.1.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	2.23.02.1.02.0004 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Provinsi Bali		Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun (%)	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
				Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	2.23.03.1.01 - Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	
					Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	2.23.03.1.01.0001 - Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	
				Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2.23.03.1.03 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	
					Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2.23.03.1.03.0003 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik (%)	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
				Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01.0001 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan	
				Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
4.01.2.23.2.24.01.0003 - Biro Umum dan Protokol							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Nilai Evaluasi Kearsipan (Nilai)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
					Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip (%)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	
					Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	2.24.02.1.01.0004 - Penyusutan Arsip Dinamis	
					Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	2.24.02.1.01.0006 - Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	
					Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.1.01.0008 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	2.24.02.1.01.0011 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	
					Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	
				Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	2.24.02.1.02.0005 - Akuisisi Arsip Statis	
				Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.1.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	2.24.02.1.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
4.01.2.23.2.24.01.0008 - Biro Humas dan Protokol							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kepuasan layanan informasi publik dan layanan keprotokolan		Persentase Informasi Publik yang tersampaikan dengan baik ke Masyarakat (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Keprotokolan (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	4.01.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	
				Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4.01.01.1.14.0002 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum										
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.01.2.23.2.24.01.0000 - Sekretariat Daerah										
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	---	73,00	73,73	74,43	75,15	75,88	76,60	
2	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali	Angka	0	18,96	24,25	28,30	33,13	37,23	43,11	
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Nilai AKIP	Nilai	-	79,40	79,80	80,20	80,60	81,00	81,40	
2	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	-	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,62	
3	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	-	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	98,31	98,32	98,33	98,34	98,35	98,36	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4.01.2.23.2.24.01.0000 - Sekretariat Daerah										
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	---	73,00	73,73	74,43	75,15	75,88	76,60	
2	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali	Angka	0	18,96	24,25	28,30	33,13	37,23	43,11	
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Nilai AKIP	Nilai	-	79,40	79,80	80,20	80,60	81,00	81,40	
2	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	-	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,62	
3	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	-	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	98,31	98,32	98,33	98,34	98,35	98,36	
4.01.2.23.2.24.01.0003 - Biro Umum dan Protokol										
III	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	83	83	83	83	83	83	83	
2	Nilai Evaluasi Kearsipan	Nilai	63	64	65	65	65,5	66	66,5	
3	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	%	100	100	60	65	70	75	80	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				37.664.577.105		42.453.095.849		44.599.457.002		49.593.383.267		51.930.373.195		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.865.770.839		3.965.770.839		4.115.070.839		6.965.770.839		7.115.770.839		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82	83	2.865.770.839	84	3.965.770.839	85	4.115.070.839	86	6.965.770.839	87	7.115.770.839	4.01.2.23.2.24.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				366.000.000		402.600.000		442.860.000		487.146.000		535.860.600		
Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	366.000.000	4	402.600.000	4	442.860.000	4	487.146.000	4	535.860.600		
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				366.000.000		402.600.000		442.860.000		487.146.000		535.860.600		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	366.000.000	4	402.600.000	4	442.860.000	4	487.146.000	4	535.860.600		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				893.770.839		1.746.570.839		1.883.950.839		4.580.059.388		4.638.679.817		
Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	893.770.839	2	1.746.570.839	2	1.883.950.839	2	4.580.059.388	2	4.638.679.817		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		26.700.000		28.570.000		30.627.000		32.889.700		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	26.700.000	1	28.570.000	1	30.627.000	1	32.889.700		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				450.000.000		495.000.000		544.500.000		598.950.000		658.845.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	450.000.000	2	495.000.000	2	544.500.000	2	598.950.000	2	658.845.000		
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	1	51.243.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				383.770.839		1.186.370.839		1.268.530.839		3.903.897.388		3.895.701.617		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	383.770.839	1	1.186.370.839	1	1.268.530.839	1	3.903.897.388	1	3.895.701.617		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.606.000.000		1.816.600.000		1.788.260.000		1.898.565.451		1.941.230.422		
Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	15	1.606.000.000	15	1.816.600.000	15	1.788.260.000	15	1.898.565.451	15	1.941.230.422		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	160		160		160		160		160			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	105	124		124		124		124		124			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.481.000.000		1.680.600.000		1.640.160.000		1.737.155.451		1.765.179.422		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	15	1.481.000.000	15	1.680.600.000	15	1.640.160.000	15	1.737.155.451	15	1.765.179.422		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				95.000.000		104.500.000		114.950.000		126.445.000		139.089.500		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	105	124	95.000.000	124	104.500.000	124	114.950.000	124	126.445.000	124	139.089.500		
4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		31.500.000		33.150.000		34.965.000		36.961.500		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	160	30.000.000	160	31.500.000	160	33.150.000	160	34.965.000	160	36.961.500		
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				1.959.614.502		2.282.115.090		2.498.915.747		2.742.868.491		2.935.621.222		
Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	70	77	1.959.614.502	79	2.282.115.090	81	2.498.915.747	83	2.742.868.491	85	2.935.621.222	4.01.2.23.2.24.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				514.614.502		632.615.090		624.465.747		620.973.491		541.536.722		
Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	2	2	514.614.502	2	632.615.090	2	624.465.747	2	620.973.491	2	541.536.722		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	11	3		2		2		2		2			
4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				309.614.502		407.115.090		376.415.747		348.118.491		241.396.222		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	11	3	309.614.502	2	407.115.090	2	376.415.747	2	348.118.491	2	241.396.222		
4.01.03.1.01.0003 - Fasilitasi Penataan Wilayah				205.000.000		225.500.000		248.050.000		272.855.000		300.140.500		
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	2	2	205.000.000	2	225.500.000	2	248.050.000	2	272.855.000	2	300.140.500		
4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah				505.000.000		565.500.000		632.050.000		705.255.000		785.780.500		
Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	2	2	505.000.000	2	565.500.000	2	632.050.000	2	705.255.000	2	785.780.500		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
4.01.03.1.02.0001 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				340.000.000		384.000.000		432.400.000		485.640.000		544.204.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	2	2	340.000.000	2	384.000.000	2	432.400.000	2	485.640.000	2	544.204.000		
4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		241.576.500		
Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	1	241.576.500		
4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				940.000.000		1.084.000.000		1.242.400.000		1.416.640.000		1.608.304.000		
Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	1	2	940.000.000	2	1.084.000.000	2	1.242.400.000	2	1.416.640.000	2	1.608.304.000		
	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.03.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		644.204.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	1	2	440.000.000	2	484.000.000	2	532.400.000	2	585.640.000	2	644.204.000		
4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				500.000.000		600.000.000		710.000.000		831.000.000		964.100.000		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	1	1	500.000.000	1	600.000.000	1	710.000.000	1	831.000.000	1	964.100.000		
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				32.839.191.764		36.205.209.920		37.985.470.416		39.884.743.937		41.878.981.134		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yangÃ Ditindaklanjuti (%)	73	80	32.839.191.764	83	36.205.209.920	85	37.985.470.416	87	39.884.743.937	90	41.878.981.134	4.01.2.23.2.24.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				3.825.000.000		4.207.500.000		4.628.250.000		5.091.075.000		5.600.182.500		
Persentase Pengembangan Mental Spiritual yang difasilitasi	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	5	6	3.825.000.000	6	4.207.500.000	6	4.628.250.000	6	5.091.075.000	6	5.600.182.500		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				3.120.000.000		3.432.000.000		3.775.200.000		4.152.720.000		4.567.992.000		
Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	100	100	3.120.000.000	100	3.432.000.000	100	3.775.200.000	100	4.152.720.000	100	4.567.992.000		
4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				705.000.000		775.500.000		853.050.000		938.355.000		1.032.190.500		
Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	5	6	705.000.000	6	775.500.000	6	853.050.000	6	938.355.000	6	1.032.190.500		
4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				29.014.191.764		31.997.709.920		33.357.220.416		34.793.668.937		36.278.798.634		
Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	1	1	29.014.191.764	1	31.997.709.920	1	33.357.220.416	1	34.793.668.937	1	36.278.798.634		
4.01.04.1.02.0003 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				29.014.191.764		31.997.709.920		33.357.220.416		34.793.668.937		36.278.798.634		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	1	1	29.014.191.764	1	31.997.709.920	1	33.357.220.416	1	34.793.668.937	1	36.278.798.634		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				6.544.055.989,00		8.235.367.232,00		8.753.382.613,00		12.050.674.819,00		12.554.090.785,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.951.063.828,00		4.051.063.828,00		4.171.570.893,00		7.021.570.893,00		7.171.570.893,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	81	81,5	2.951.063.828,00	82	4.051.063.828,00	82,5	4.171.570.893,00	82,5	7.021.570.893,00	83	7.171.570.893,00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum	
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.630.977.687,00		2.308.789.476,00		2.361.808.298,00		3.944.974.482,00		4.040.083.185,00		
Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	1.630.977.687,00	2	2.308.789.476,00	2	2.361.808.298,00	2	3.944.974.482,00	2	4.040.083.185,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.366.710,00		25.176.723,00		25.176.723,00		42.800.429,00		42.800.429,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	19.366.710,00	1	25.176.723,00	1	25.176.723,00	1	42.800.429,00	1	42.800.429,00		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.359.456.987,00		1.767.294.083,00		1.820.312.905,00		3.024.432.314,00		3.075.653.930,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	1.359.456.987,00	2	1.767.294.083,00	2	1.820.312.905,00	2	3.024.432.314,00	2	3.075.653.930,00		
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.089.990,00		15.716.987,00		19.716.987,00		26.718.878,00		28.054.822,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	12.089.990,00	2	15.716.987,00	2	19.716.987,00	2	26.718.878,00	2	28.054.822,00		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240.064.000,00		500.601.683,00		496.601.683,00		851.022.861,00		893.574.004,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	240.064.000,00	1	500.601.683,00	1	496.601.683,00	1	851.022.861,00	1	893.574.004,00		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.320.086.141,00		1.742.274.352,00		1.809.762.595,00		3.076.596.411,00		3.131.487.708,00		
Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120	120	1.320.086.141,00	120	1.742.274.352,00	120	1.809.762.595,00	120	3.076.596.411,00	120	3.131.487.708,00		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13		13		13		13		13			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.254.207.141,00		1.630.469.283,00		1.694.603.374,00		2.880.825.735,00		2.925.928.499,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	1.254.207.141,00	13	1.630.469.283,00	13	1.694.603.374,00	13	2.880.825.735,00	13	2.925.928.499,00		
4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.760.000,00		2.464.000,00		2.537.920,00		4.314.464,00		4.530.187,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	20	1.760.000,00	20	2.464.000,00	20	2.537.920,00	20	4.314.464,00	20	4.530.187,00		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.119.000,00		109.341.069,00		112.621.301,00		191.456.212,00		201.029.022,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120	120	64.119.000,00	120	109.341.069,00	120	112.621.301,00	120	191.456.212,00	120	201.029.022,00		
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				3.592.992.161,00		4.184.303.404,00		4.581.811.720,00		5.029.103.926,00		5.382.519.892,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum (%)	100	100	3.592.992.161,00	100	4.184.303.404,00	100	4.581.811.720,00	100	5.029.103.926,00	100	5.382.519.892,00	4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum	
4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				1.634.240.568,00		1.846.215.592,00		1.993.912.840,00		2.193.304.124,00		2.319.856.106,00		
Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	1.000	1.000	1.634.240.568,00	1.000	1.846.215.592,00	1.000	1.993.912.840,00	1.000	2.193.304.124,00	1.000	2.319.856.106,00		
	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	45	45		45		45		45		45			
	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	150	150		175		200		225		250			
4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				1.052.582.292,00		1.206.391.489,00		1.302.902.808,00		1.433.193.090,00		1.498.936.188,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	45	45	1.052.582.292,00	45	1.206.391.489,00	45	1.302.902.808,00	45	1.433.193.090,00	45	1.498.936.188,00		
4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				102.149.284,00		112.364.212,00		121.353.349,00		133.488.684,00		144.167.779,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	1.000	1.000	102.149.284,00	1.000	112.364.212,00	1.000	121.353.349,00	1.000	133.488.684,00	1.000	144.167.779,00		
4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				149.700.392,00		164.670.431,00		177.844.066,00		195.628.472,00		211.278.750,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	50	50	149.700.392,00	50	164.670.431,00	50	177.844.066,00	50	195.628.472,00	50	211.278.750,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				329.808.600,00		362.789.460,00		391.812.617,00		430.993.878,00		465.473.389,00		
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	150	150	329.808.600,00	175	362.789.460,00	200	391.812.617,00	225	430.993.878,00	250	465.473.389,00		
4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum				1.958.751.593,00		2.338.087.812,00		2.587.898.880,00		2.835.799.802,00		3.062.663.786,00		
Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	10	18	1.958.751.593,00	18	2.338.087.812,00	18	2.587.898.880,00	18	2.835.799.802,00	18	3.062.663.786,00		
	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	39	43		43		43		43		43			
4.01.05.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				1.834.610.593,00		2.201.532.712,00		2.437.688.270,00		2.670.568.131,00		2.884.213.581,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	39	43	1.834.610.593,00	43	2.201.532.712,00	43	2.437.688.270,00	43	2.670.568.131,00	43	2.884.213.581,00		
4.01.05.1.02.0002 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				124.141.000,00		136.555.100,00		150.210.610,00		165.231.671,00		178.450.205,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	10	18	124.141.000,00	18	136.555.100,00	18	150.210.610,00	18	165.231.671,00	18	178.450.205,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				4.396.920.980,00		5.803.161.528,00		6.159.031.390,00		8.959.443.886,00		9.292.478.297,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.536.107.573,00		3.636.107.573,00		3.786.107.573,00		6.354.867.100,00		6.504.867.100,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82	83	2.536.107.573,00	84	3.636.107.573,00	84	3.786.107.573,00	84	6.354.867.100,00	84	6.504.867.100,00	4.01.2.23.2.24.01.0007 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.000.000,00		14.250.000,00		14.500.000,00		18.000.000,00		25.099.871,00		
Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	14.000.000,00	8	14.250.000,00	8	14.500.000,00	8	18.000.000,00	8	25.099.871,00		
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.000.000,00		14.250.000,00		14.500.000,00		18.000.000,00		25.099.871,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	14.000.000,00	8	14.250.000,00	8	14.500.000,00	8	18.000.000,00	8	25.099.871,00		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.748.257.563,00		2.580.650.073,00		2.684.279.323,00		5.156.824.400,00		5.263.039.561,00		
Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	1.748.257.563,00	12	2.580.650.073,00	12	2.684.279.323,00	12	5.156.824.400,00	12	5.263.039.561,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.537.807.563,00		2.351.259.573,00		2.431.949.773,00		4.675.144.750,00		4.542.659.225,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	1.537.807.563,00	12	2.351.259.573,00	12	2.431.949.773,00	12	4.675.144.750,00	12	4.542.659.225,00		
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				37.950.000,00		41.365.500,00		45.502.050,00		181.169.370,00		282.638.252,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	37.950.000,00	1	41.365.500,00	1	45.502.050,00	1	181.169.370,00	1	282.638.252,00		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				172.500.000,00		188.025.000,00		206.827.500,00		300.510.280,00		437.742.084,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	9	9	172.500.000,00	9	188.025.000,00	9	206.827.500,00	9	300.510.280,00	9	437.742.084,00		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				773.850.010,00		1.041.207.500,00		1.087.328.250,00		1.180.042.700,00		1.216.727.668,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	185	185	773.850.010,00	185	1.041.207.500,00	185	1.087.328.250,00	185	1.180.042.700,00	185	1.216.727.668,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	37	37		37		37		37		37			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				632.500.000,00		889.425.000,00		920.367.500,00		996.385.875,00		1.014.705.168,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	37	37	632.500.000,00	37	889.425.000,00	37	920.367.500,00	37	996.385.875,00	37	1.014.705.168,00		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				141.350.010,00		151.782.500,00		166.960.750,00		183.656.825,00		202.022.500,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	185	185	141.350.010,00	185	151.782.500,00	185	166.960.750,00	185	183.656.825,00	185	202.022.500,00		
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				892.420.001,00		1.039.288.671,00		1.138.020.968,00		1.249.118.486,00		1.336.899.217,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti (%)	100	100	892.420.001,00	100	1.039.288.671,00	100	1.138.020.968,00	100	1.249.118.486,00	100	1.336.899.217,00	4.01.2.23.2.24.01.0007 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	
4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				322.473.335,00		371.429.557,00		391.560.332,00		436.935.349,00		467.223.722,00		
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	2	2	322.473.335,00	2	371.429.557,00	2	391.560.332,00	2	436.935.349,00	2	467.223.722,00		
4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				322.473.335,00		371.429.557,00		391.560.332,00		436.935.349,00		467.223.722,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	2	2	322.473.335,00	2	371.429.557,00	2	391.560.332,00	2	436.935.349,00	2	467.223.722,00		
4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				322.473.333,00		371.429.557,00		391.560.332,00		436.935.349,00		467.223.722,00		
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	2	2	322.473.333,00	2	371.429.557,00	2	391.560.332,00	2	436.935.349,00	2	467.223.722,00		
4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				322.473.333,00		371.429.557,00		391.560.332,00		436.935.349,00		467.223.722,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	2	2	322.473.333,00	2	371.429.557,00	2	391.560.332,00	2	436.935.349,00	2	467.223.722,00		
4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				247.473.333,00		296.429.557,00		354.900.304,00		375.247.788,00		402.451.773,00		
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	1	1	247.473.333,00	1	296.429.557,00	1	354.900.304,00	1	375.247.788,00	1	402.451.773,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				247.473.333,00		296.429.557,00		354.900.304,00		375.247.788,00		402.451.773,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	1	1	247.473.333,00	1	296.429.557,00	1	354.900.304,00	1	375.247.788,00	1	402.451.773,00		
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				853.541.591,00		994.011.906,00		1.088.442.916,00		1.194.700.445,00		1.278.657.005,00		
Meningkatnya Kualitas Pengadaaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (%)	85	85	853.541.591,00	85	994.011.906,00	90	1.088.442.916,00	90	1.194.700.445,00	90	1.278.657.005,00	4.01.2.23.2.24.01.0007 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	
4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				237.864.392,00		305.835.694,00		342.096.261,00		383.489.926,00		414.026.154,00		
Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12	237.864.392,00	12	305.835.694,00	12	342.096.261,00	12	383.489.926,00	12	414.026.154,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				78.269.764,00		100.875.951,00		112.909.338,00		126.651.089,00		136.770.887,00		
Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12	78.269.764,00	12	100.875.951,00	12	112.909.338,00	12	126.651.089,00	12	136.770.887,00		
4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				98.213.364,00		121.816.724,00		134.897.157,00		149.738.298,00		161.012.457,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	98.213.364,00	1	121.816.724,00	1	134.897.157,00	1	149.738.298,00	1	161.012.457,00		
4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				61.381.264,00		83.143.019,00		94.289.766,00		107.100.539,00		116.242.810,00		
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12	61.381.264,00	12	83.143.019,00	12	94.289.766,00	12	107.100.539,00	12	116.242.810,00		
4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				331.667.906,00		333.888.376,00		353.375.634,00		374.282.075,00		394.515.281,00		
Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	12	12	331.667.906,00	12	333.888.376,00	12	353.375.634,00	12	374.282.075,00	12	394.515.281,00		
	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				188.333.953,00		190.569.188,00		201.492.567,00		213.187.600,00		224.606.531,00		
Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	12	12	188.333.953,00	12	190.569.188,00	12	201.492.567,00	12	213.187.600,00	12	224.606.531,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				143.333.953,00		143.319.188,00		151.883.067,00		161.094.475,00		169.908.750,00		
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12	143.333.953,00	12	143.319.188,00	12	151.883.067,00	12	161.094.475,00	12	169.908.750,00		
4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				284.009.293,00		354.287.836,00		392.971.021,00		436.928.444,00		470.115.570,00		
Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	284.009.293,00	1	354.287.836,00	1	392.971.021,00	1	436.928.444,00	1	470.115.570,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	90	90		90		90		90		90			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				134.669.764,00		160.095.944,00		175.090.338,00		191.961.166,00		205.325.440,00		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	90	90	134.669.764,00	90	160.095.944,00	90	175.090.338,00	90	191.961.166,00	90	205.325.440,00		
4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				64.669.765,00		86.595.948,00		97.915.345,00		110.907.389,00		120.240.003,00		
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	64.669.765,00	1	86.595.948,00	1	97.915.345,00	1	110.907.389,00	1	120.240.003,00		
4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				84.669.764,00		107.595.944,00		119.965.338,00		134.059.889,00		144.550.127,00		
Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	84.669.764,00	1	107.595.944,00	1	119.965.338,00	1	134.059.889,00	1	144.550.127,00		
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				114.851.815,00		133.753.378,00		146.459.933,00		160.757.855,00		172.054.975,00		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)	87	87	114.851.815,00	87	133.753.378,00	90	146.459.933,00	90	160.757.855,00	90	172.054.975,00	4.01.2.23.2.24.01.0007 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	
4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				57.425.908,00		66.876.689,00		73.228.466,00		80.387.916,00		86.027.487,00		
Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	1	1	57.425.908,00	1	66.876.689,00	1	73.228.466,00	1	80.387.916,00	1	86.027.487,00		
4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				57.425.908,00		66.876.689,00		73.228.466,00		80.387.916,00		86.027.487,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	1	1	57.425.908,00	1	66.876.689,00	1	73.228.466,00	1	80.387.916,00	1	86.027.487,00		
4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				57.425.907,00		66.876.689,00		73.231.467,00		80.369.939,00		86.027.488,00		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	57.425.907,00	1	66.876.689,00	1	73.231.467,00	1	80.369.939,00	1	86.027.488,00		
4.01.08.1.02.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				57.425.907,00		66.876.689,00		73.231.467,00		80.369.939,00		86.027.488,00		
Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	57.425.907,00	1	66.876.689,00	1	73.231.467,00	1	80.369.939,00	1	86.027.488,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.255.000.000,00		1.380.500.000,00		1.518.550.000,00		1.670.405.000,00		1.837.445.500,00		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.030.000.000,00		1.133.000.000,00		1.246.300.000,00		1.370.930.000,00		1.508.023.000,00		
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Provinsi Bali	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik (%)	60	70	1.030.000.000,00	72	1.133.000.000,00	74	1.246.300.000,00	76	1.370.930.000,00	78	1.508.023.000,00	4.01.2.23.2.24.01.00 05 - Biro Organisasi	
2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				888.928.789,00		968.000.000,00		1.064.800.000,00		1.171.280.000,00		1.288.408.000,00		
Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	1.000	1.000	888.928.789,00	1.000	968.000.000,00	1.000	1.064.800.000,00	1.000	1.171.280.000,00	1.000	1.288.408.000,00		
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	0	1		1		1		1		0			
	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	80	50		50		50		50		50			
2.23.02.1.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				254.464.394,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	80	50	254.464.394,00	50	275.000.000,00	50	302.500.000,00	50	332.750.000,00	50	366.025.000,00		
2.23.02.1.01.0009 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				254.464.395,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	1.000	1.000	254.464.395,00	1.000	275.000.000,00	1.000	302.500.000,00	1.000	332.750.000,00	1.000	366.025.000,00		
2.23.02.1.01.0011 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		161.051.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	0	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00	0	161.051.000,00		
2.23.02.1.01.0016 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				270.000.000,00		297.000.000,00		326.700.000,00		359.370.000,00		395.307.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	1	270.000.000,00	1	297.000.000,00	1	326.700.000,00	1	359.370.000,00	1	395.307.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.23.02.1.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				141.071.211,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	15	10	141.071.211,00	10	165.000.000,00	10	181.500.000,00	10	199.650.000,00	10	219.615.000,00		
2.23.02.1.02.0004 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				141.071.211,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	15	10	141.071.211,00	10	165.000.000,00	10	181.500.000,00	10	199.650.000,00	10	219.615.000,00		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		329.422.500,00		
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Provinsi Bali	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun (%)	5	5	225.000.000,00	7	247.500.000,00	9	272.250.000,00	11	299.475.000,00	13	329.422.500,00	4.01.2.23.2.24.01.00 05 - Biro Organisasi	
2.23.03.1.01 - Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi				112.500.000,00		123.750.000,00		136.125.000,00		149.737.500,00		164.711.250,00		
Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	300	300	112.500.000,00	300	123.750.000,00	300	136.125.000,00	300	149.737.500,00	300	164.711.250,00		
2.23.03.1.01.0001 - Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				112.500.000,00		123.750.000,00		136.125.000,00		149.737.500,00		164.711.250,00		
Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	300	300	112.500.000,00	300	123.750.000,00	300	136.125.000,00	300	149.737.500,00	300	164.711.250,00		
2.23.03.1.03 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi				112.500.000,00		123.750.000,00		136.125.000,00		149.737.500,00		164.711.250,00		
Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	10	10	112.500.000,00	10	123.750.000,00	10	136.125.000,00	10	149.737.500,00	10	164.711.250,00		
2.23.03.1.03.0003 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				112.500.000,00		123.750.000,00		136.125.000,00		149.737.500,00		164.711.250,00		
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	10	10	112.500.000,00	10	123.750.000,00	10	136.125.000,00	10	149.737.500,00	10	164.711.250,00		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				3.371.079.315,00		4.597.872.414,00		4.833.108.930,00		7.779.020.456,00		8.004.802.382,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.600.644.785,00		3.700.644.785,00		3.850.644.785,00		6.700.644.785,00		6.850.644.785,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	85	87	2.600.644.785,00	88	3.700.644.785,00	88	3.850.644.785,00	88	6.700.644.785,00	88	6.850.644.785,00	4.01.2.23.2.24.01.00 05 - Biro Organisasi	
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00		
4.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.511.742.000,00		2.163.888.204,00		2.245.044.000,00		3.950.910.000,00		4.039.323.500,00		
Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1.511.742.000,00	1	2.163.888.204,00	1	2.245.044.000,00	1	3.950.910.000,00	1	4.039.323.500,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15		15		15		15		15			
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				118.914.000,00		295.378.000,00		282.498.000,00		802.535.000,00		776.096.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	1	118.914.000,00	1	295.378.000,00	1	282.498.000,00	1	802.535.000,00	1	776.096.000,00		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				943.914.000,00		1.210.132.204,00		1.280.748.000,00		1.906.610.000,00		1.993.978.500,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	943.914.000,00	15	1.210.132.204,00	15	1.280.748.000,00	15	1.906.610.000,00	15	1.993.978.500,00		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				448.914.000,00		658.378.000,00		681.798.000,00		1.241.765.000,00		1.269.249.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	448.914.000,00	1	658.378.000,00	1	681.798.000,00	1	1.241.765.000,00	1	1.269.249.000,00		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.078.902.785,00		1.525.756.581,00		1.593.500.785,00		2.736.424.785,00		2.796.680.285,00		
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	130	117	1.078.902.785,00	117	1.525.756.581,00	117	1.593.500.785,00	117	2.736.424.785,00	117	2.796.680.285,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	13		13		13		13		13			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				894.450.000,00		1.153.378.000,00		1.226.298.000,00		1.840.715.000,00		1.918.094.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	13	894.450.000,00	13	1.153.378.000,00	13	1.226.298.000,00	13	1.840.715.000,00	13	1.918.094.000,00		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				184.452.785,00		372.378.581,00		367.202.785,00		895.709.785,00		878.586.285,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	130	117	184.452.785,00	117	372.378.581,00	117	367.202.785,00	117	895.709.785,00	117	878.586.285,00		
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				770.434.530,00		897.227.629,00		982.464.145,00		1.078.375.671,00		1.154.157.597,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik (%)	87	91	770.434.530,00	93	897.227.629,00	95	982.464.145,00	97	1.078.375.671,00	99	1.154.157.597,00	4.01.2.23.2.24.01.00 05 - Biro Organisasi	
4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				229.907.770,00		272.964.225,00		300.406.000,00		345.968.000,00		386.862.000,00		
Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	29	29	229.907.770,00	29	272.964.225,00	29	300.406.000,00	29	345.968.000,00	29	386.862.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.02.1.01.0001 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				63.557.559,00		77.141.969,00		86.202.000,00		101.206.000,00		114.654.000,00		
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	63.557.559,00	1	77.141.969,00	1	86.202.000,00	1	101.206.000,00	1	114.654.000,00		
4.01.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				55.710.541,00		68.834.305,00		77.952.000,00		92.956.000,00		106.404.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	55.710.541,00	1	68.834.305,00	1	77.952.000,00	1	92.956.000,00	1	106.404.000,00		
4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan				110.639.670,00		126.987.951,00		136.252.000,00		151.806.000,00		165.804.000,00		
Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	29	29	110.639.670,00	29	126.987.951,00	29	136.252.000,00	29	151.806.000,00	29	165.804.000,00		
4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				540.526.760,00		624.263.404,00		682.058.145,00		732.407.671,00		767.295.597,00		
Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1	540.526.760,00	1	624.263.404,00	1	682.058.145,00	1	732.407.671,00	1	767.295.597,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				149.874.762,00		168.526.264,00		177.471.000,00		193.156.000,00		199.204.000,00		
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	149.874.762,00	1	168.526.264,00	1	177.471.000,00	1	193.156.000,00	1	199.204.000,00		
4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				138.104.235,00		156.075.884,00		165.371.000,00		178.056.000,00		187.632.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	3	3	138.104.235,00	3	156.075.884,00	3	165.371.000,00	3	178.056.000,00	3	187.632.500,00		
4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				41.972.398,00		58.016.158,00		73.521.000,00		76.306.000,00		82.304.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1	41.972.398,00	1	58.016.158,00	1	73.521.000,00	1	76.306.000,00	1	82.304.000,00		
4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				110.639.670,00		126.987.948,00		136.221.000,00		151.091.000,00		156.854.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	2	2	110.639.670,00	2	126.987.948,00	2	136.221.000,00	2	151.091.000,00	2	156.854.000,00		
4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				99.935.695,00		114.657.150,00		129.474.145,00		133.798.671,00		141.301.097,00		
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4	4	99.935.695,00	4	114.657.150,00	4	129.474.145,00	4	133.798.671,00	4	141.301.097,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				449.040.991,00		489.663.489,00		502.060.379,00		500.975.672,00		487.437.552,00		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				449.040.991,00		489.663.489,00		502.060.379,00		500.975.672,00		487.437.552,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Kearsipan (Nilai)	63	65	449.040.991,00	65	489.663.489,00	65,5	502.060.379,00	66	500.975.672,00	66,5	487.437.552,00	4.01.2.23.2.24.01.00 03 - Biro Umum dan Protokol	
	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip (%)	100	60		65		70		75		80			
2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				339.040.991,00		378.163.489,00		386.060.379,00		384.975.672,00		374.437.552,00		
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	0	45	339.040.991,00	45	378.163.489,00	45	386.060.379,00	45	384.975.672,00	45	374.437.552,00		
	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	0	42		42		42		42		42			
	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
2.24.02.1.01.0004 - Penyusutan Arsip Dinamis				40.000.000,00		40.500.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		41.000.000,00		
Terlaksananya Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	0	1.000	40.000.000,00	1.000	40.500.000,00	1.000	42.000.000,00	1.000	42.000.000,00	1.000	41.000.000,00		
2.24.02.1.01.0006 - Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				119.040.991,00		139.540.991,00		141.437.881,00		140.353.174,00		135.815.054,00		
Terciptanya dan Terpeliharanya Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	1.000	1.000	119.040.991,00	1.000	139.540.991,00	1.000	141.437.881,00	1.000	140.353.174,00	1.000	135.815.054,00		
2.24.02.1.01.0008 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi				60.000.000,00		60.500.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		61.000.000,00		
Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	0	42	60.000.000,00	42	60.500.000,00	42	62.000.000,00	42	62.000.000,00	42	61.000.000,00		
2.24.02.1.01.0011 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				40.000.000,00		40.500.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		41.000.000,00		
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	0	2	40.000.000,00	2	40.500.000,00	2	42.000.000,00	2	42.000.000,00	2	41.000.000,00		
2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				80.000.000,00		97.122.498,00		98.622.498,00		98.622.498,00		95.622.498,00		
Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	0	45	80.000.000,00	45	97.122.498,00	45	98.622.498,00	45	98.622.498,00	45	95.622.498,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				40.000.000,00		40.500.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		41.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	0	10	40.000.000,00	10	40.500.000,00	10	42.000.000,00	10	42.000.000,00	10	41.000.000,00		
2.24.02.1.02.0005 - Akuisisi Arsip Statis				40.000.000,00		40.500.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		41.000.000,00		
Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	0	10	40.000.000,00	10	40.500.000,00	10	42.000.000,00	10	42.000.000,00	10	41.000.000,00		
2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				70.000.000,00		71.000.000,00		74.000.000,00		74.000.000,00		72.000.000,00		
Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	400	250	70.000.000,00	250	71.000.000,00	250	74.000.000,00	250	74.000.000,00	250	72.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	45	45		45		45		45		45			
2.24.02.1.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				30.000.000,00		30.500.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		31.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	400	250	30.000.000,00	250	30.500.000,00	250	32.000.000,00	250	32.000.000,00	250	31.000.000,00		
2.24.02.1.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				40.000.000,00		40.500.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		41.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	45	45	40.000.000,00	45	40.500.000,00	45	42.000.000,00	45	42.000.000,00	45	41.000.000,00		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				69.800.564.515,00		71.560.135.789,00		71.710.135.789,00		74.710.135.789,00		74.312.690.615,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				69.800.564.515,00		71.560.135.789,00		71.710.135.789,00		74.710.135.789,00		74.312.690.615,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	83	83	69.800.564.515,00	83	71.560.135.789,00	83	71.710.135.789,00	83	74.710.135.789,00	83	74.312.690.615,00	4.01.2.23.2.24.01.0003 - Biro Umum dan Protokol	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		
Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00		
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00		
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				385.436.464,00		385.436.464,00		385.436.464,00		485.436.464,00		585.436.464,00		
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	385.436.464,00	12	385.436.464,00	12	385.436.464,00	12	485.436.464,00	12	585.436.464,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				385.436.464,00		385.436.464,00		385.436.464,00		485.436.464,00		585.436.464,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	385.436.464,00	12	385.436.464,00	12	385.436.464,00	12	485.436.464,00	12	585.436.464,00		
4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	21	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00		
4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	21	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				13.360.659.943,00		15.160.659.943,00		15.160.659.943,00		17.018.659.944,00		16.979.214.770,00		
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	12	13.360.659.943,00	12	15.160.659.943,00	12	15.160.659.943,00	12	17.018.659.944,00	12	16.979.214.770,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				620.027.020,00		620.027.020,00		620.027.020,00		620.027.020,00		620.027.020,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	620.027.020,00	2	620.027.020,00	2	620.027.020,00	2	620.027.020,00	2	620.027.020,00		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.003.505.783,00		2.502.509.019,00		2.502.509.019,00		2.507.509.019,00		2.512.509.019,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	2.003.505.783,00	5	2.502.509.019,00	5	2.502.509.019,00	5	2.507.509.019,00	5	2.512.509.019,00		
4.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.059.833.477,00		6.559.833.477,00		6.559.833.477,00		6.659.833.477,00		6.759.833.477,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	6.059.833.477,00	12	6.559.833.477,00	12	6.559.833.477,00	12	6.659.833.477,00	12	6.759.833.477,00		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.303.252.134,00		5.104.248.898,00		5.104.248.898,00		6.852.248.899,00		6.702.803.725,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	4.303.252.134,00	12	5.104.248.898,00	12	5.104.248.898,00	12	6.852.248.899,00	12	6.702.803.725,00		
4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				374.041.529,00		374.041.529,00		374.041.529,00		379.041.529,00		384.041.529,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	12	374.041.529,00	12	374.041.529,00	12	374.041.529,00	12	379.041.529,00	12	384.041.529,00		
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.328.674.720,00		14.288.245.994,00		14.288.245.994,00		14.328.245.994,00		13.868.245.994,00		
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	14.328.674.720,00	12	14.288.245.994,00	12	14.288.245.994,00	12	14.328.245.994,00	12	13.868.245.994,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.069.469.360,00		2.069.469.360,00		2.069.469.360,00		2.089.469.360,00		2.109.469.360,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.069.469.360,00	12	2.069.469.360,00	12	2.069.469.360,00	12	2.089.469.360,00	12	2.109.469.360,00		
4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.991.733.308,00		6.951.304.582,00		6.951.304.582,00		6.961.304.582,00		6.471.304.582,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.991.733.308,00	12	6.951.304.582,00	12	6.951.304.582,00	12	6.961.304.582,00	12	6.471.304.582,00		
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.267.472.052,00		5.267.472.052,00		5.267.472.052,00		5.277.472.052,00		5.287.472.052,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.267.472.052,00	12	5.267.472.052,00	12	5.267.472.052,00	12	5.277.472.052,00	12	5.287.472.052,00		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.472.967.023,00		12.472.967.023,00		12.472.967.023,00		12.472.967.023,00		12.472.967.023,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	141	136	12.472.967.023,00	136	12.472.967.023,00	136	12.472.967.023,00	136	12.472.967.023,00	136	12.472.967.023,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.518.073.142,00		6.518.073.142,00		6.518.073.142,00		6.518.073.142,00		6.518.073.142,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	141	136	6.518.073.142,00	136	6.518.073.142,00	136	6.518.073.142,00	136	6.518.073.142,00	136	6.518.073.142,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.954.893.881,00		5.954.893.881,00		5.954.893.881,00		5.954.893.881,00		5.954.893.881,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25	12	5.954.893.881,00	12	5.954.893.881,00	12	5.954.893.881,00	12	5.954.893.881,00	12	5.954.893.881,00		
4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		
Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00		
4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00		
4.01.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				22.564.506.771,00		22.564.506.771,00		22.714.506.771,00		23.716.506.770,00		23.718.506.770,00		
Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	22.564.506.771,00	1	22.564.506.771,00	1	22.714.506.771,00	1	23.716.506.770,00	1	23.718.506.770,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	47	47		47		47		47		47			
4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				13.668.985.825,00		13.668.985.825,00		13.818.985.825,00		14.318.985.824,00		14.318.985.824,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	47	47	13.668.985.825,00	47	13.668.985.825,00	47	13.818.985.825,00	47	14.318.985.824,00	47	14.318.985.824,00		
4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				8.491.023.848,00		8.491.023.848,00		8.491.023.848,00		8.991.023.848,00		8.991.023.848,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	40	40	8.491.023.848,00	40	8.491.023.848,00	40	8.491.023.848,00	40	8.991.023.848,00	40	8.991.023.848,00		
4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				404.497.098,00		404.497.098,00		404.497.098,00		406.497.098,00		408.497.098,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	404.497.098,00	1	404.497.098,00	1	404.497.098,00	1	406.497.098,00	1	408.497.098,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				27.732.433.474,00		29.119.055.148,00		30.575.007.905,00		32.103.758.300,00		33.708.946.215,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				27.732.433.474,00		29.119.055.148,00		30.575.007.905,00		32.103.758.300,00		33.708.946.215,00		
Meningkatnya kepuasan layanan informasi publik dan layanan keprotokolan	Persentase Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Keprotokolan (%)	0	91	20.923.858.964,00	92	21.970.051.912,00	93	23.068.554.508,00	94	24.221.982.233,00	95	25.433.081.345,00	4.01.2.23.2.24.01.0008 - Biro Humas dan Protokol	
	Persentase Informasi Publik yang tersampaikan dengan baik ke Masyarakat (%)	0	94		95		96		97		98			
4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				16.500.000.000,00		17.325.000.000,00		18.191.250.000,00		19.100.812.500,00		20.055.853.125,00		
Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	0	12	16.500.000.000,00	12	17.325.000.000,00	12	18.191.250.000,00	12	19.100.812.500,00	12	20.055.853.125,00		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	0	36		36		36		36		36			
4.01.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan				2.200.000.000,00		2.310.000.000,00		2.425.500.000,00		2.546.775.000,00		2.674.113.750,00		
Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	0	36	2.200.000.000,00	36	2.310.000.000,00	36	2.425.500.000,00	36	2.546.775.000,00	36	2.674.113.750,00		
4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12.300.000.000,00		12.915.000.000,00		13.560.750.000,00		14.238.787.500,00		14.950.726.875,00		
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	0	12	12.300.000.000,00	12	12.915.000.000,00	12	13.560.750.000,00	12	14.238.787.500,00	12	14.950.726.875,00		
4.01.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		2.205.000.000,00		2.315.250.000,00		2.431.012.500,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	0	12	2.000.000.000,00	12	2.100.000.000,00	12	2.205.000.000,00	12	2.315.250.000,00	12	2.431.012.500,00		
4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan				4.423.858.964,00		4.645.051.912,00		4.877.304.508,00		5.121.169.733,00		5.377.228.220,00		
Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	0	12	4.423.858.964,00	12	4.645.051.912,00	12	4.877.304.508,00	12	5.121.169.733,00	12	5.377.228.220,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.14.0002 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.800.000.000,00		1.890.000.000,00		1.984.500.000,00		2.083.725.000,00		2.187.911.250,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	0	12	1.800.000.000,00	12	1.890.000.000,00	12	1.984.500.000,00	12	2.083.725.000,00	12	2.187.911.250,00		
4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				2.623.858.964,00		2.755.051.912,00		2.892.804.508,00		3.037.444.733,00		3.189.316.970,00		
Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	0	12	2.623.858.964,00	12	2.755.051.912,00	12	2.892.804.508,00	12	3.037.444.733,00	12	3.189.316.970,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	0	82	6.808.574.510,00	83	7.149.003.236,00	84	7.506.453.397,00	85	7.881.776.067,00	86	8.275.864.870,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.321.938.010,00		5.588.034.911,00		5.867.436.656,00		6.160.808.489,00		6.468.848.913,00		
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	5.321.938.010,00	1	5.588.034.911,00	1	5.867.436.656,00	1	6.160.808.489,00	1	6.468.848.913,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	10		10		10		10		12			
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.363.500,00		14.031.675,00		14.733.259,00		15.469.921,00		16.243.418,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	13.363.500,00	1	14.031.675,00	1	14.733.259,00	1	15.469.921,00	1	16.243.418,00		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.387.558.855,00		1.456.936.798,00		1.529.783.637,00		1.606.272.820,00		1.686.586.460,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	10	1.387.558.855,00	10	1.456.936.798,00	10	1.529.783.637,00	10	1.606.272.820,00	12	1.686.586.460,00		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.921.015.655,00		4.117.066.438,00		4.322.919.760,00		4.539.065.748,00		4.766.019.035,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	3.921.015.655,00	12	4.117.066.438,00	12	4.322.919.760,00	12	4.539.065.748,00	12	4.766.019.035,00		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.486.636.500,00		1.560.968.325,00		1.639.016.741,00		1.720.967.578,00		1.807.015.957,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	43	1.486.636.500,00	43	1.560.968.325,00	45	1.639.016.741,00	50	1.720.967.578,00	55	1.807.015.957,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	17		18		20		22		25			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.439.706.500,00		1.511.691.825,00		1.587.276.416,00		1.666.640.237,00		1.749.972.249,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	17	1.439.706.500,00	18	1.511.691.825,00	20	1.587.276.416,00	22	1.666.640.237,00	25	1.749.972.249,00		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.930.000,00		49.276.500,00		51.740.325,00		54.327.341,00		57.043.708,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	43	46.930.000,00	43	49.276.500,00	45	51.740.325,00	50	54.327.341,00	55	57.043.708,00		